ABSTRAK

Konsep pelelangan yang merupakan perpaduan dari bidang hukum, ekonomi dan keuangan yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama sejak berlakunya Venduu Reglement yang mengatur ketentuan tentang lelang, hal tersebut dikarenakan lelang berbeda dari jual beli biasa, dalam pelelangan barang yang dijual lebih banyak dan variatif, sehingga pembeli leluasa untuk memilih barang dan seringkali mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran pada umumnya. Pejabat Lelang yang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan. Dalam Penelitian ini mempertanyakan tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang yang akan sangat bermanfaat bagi pejabat lelang sendiri dan mengetahui pihak yang bertanggung gugat apabila dalam proses pelelangan merugikan pihak ketiga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.

Hasil dari penelitian dan analisa menunjukan tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari setiap tahap dalam proses pelelangan, diantaranya adalah tahap pra lelang dan pasca lelang yang berkaitan erat dengan dokumen lelang itu sendiri dimana Pejabat Lelang bertanggung jawab untuk mengecek keterangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen lelang yang telah diserahkan memiliki suatu namun dia tidak bertanggung jawab atas kebenarannya. Apabila terdapat gugatan dalam suatu pelelangan dalam tahap pra lelang dan pelaksanaan lelang yang dilakukan, maka yang bertanggung gugat disini adalah instansi pelaksana lelang yaitu KPKLN dan BPN sebagai suatu instansi dalam hal teknis suatu pelelangan dimana dalam hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang menyangkut kebenaran formil. Gugatan yang berkaitan dengan kebenaran materil dari dokumen lelang maka pihak yang bertanggung gugat adalah pihak pemilik barang/pemohon atau pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Namun dalam tahap pasca lelang, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam tahap ini maka pejabat lelang yang bertanggung gugat secara pidana dan perdata

Kata kunci: Tanggung jawab, lelang, pejabat lelang

*ABSTRACT*

*The auction concept is a combination of law, economy and finance that is very popular with the community, especially since the enactment of the Venduu Reglement which regulates the provisions of the auction, this is because auction is different from ordinary buying and selling, in the auction of goods sold more and more varied, so that Buyers are free to choose goods and often get a lower price than the market price in general. Auction Officer who is a person specifically authorized by the Minister of Finance to carry out the sale of goods by auction based on the prevailing laws and regulations has an important role in the auction process. In this study, the auction official questioned the responsibility of the validity of the auction documents which would be very useful for the auction officials themselves and knowing the parties who are accountable if the auction process harms third parties.*

*The research method used in this research is descriptive analytical, namely research specifications that describe the problem under study, with a normative juridical approach, data is obtained from secondary legal sources which are used as primary legal material in the form of laws, books, journals. Data obtained from field studies and document studies are then analyzed in a qualitative juridical manner, that is, after the data has been collected, it is then poured in the form of a logical and systematic description by not using mathematical formulas.*

*The results of the research and analysis show that the auction official's responsibility for the validity of the tender documents can be seen from each stage in the auction process, including the pre-auction and post-auction stages that are closely related to the auction documents themselves where the Bidding Officer is responsible for checking the information contained in The auction documents that have been submitted have an unbroken "storyline" but he is not responsible for their accuracy. If there is a lawsuit in an auction in the pre-auction stage and the implementation of the auction, then the one who is responsible here is the auctioning agency, namely KPKLN and BPN as an agency in the technical matters of an auction, which in this case also cannot be separated from the responsibility of the auction official for the validity of the documents. auction concerning formal truth. A lawsuit is related to the material correctness of the auction documents, so the party responsible for the lawsuit is the owner of the goods / applicant or the party who issued the statement. However, in the post-auction stage, if the obligations at this stage are not carried out, the auction official is liable for both criminal and civil liability*

*Keywords: Responsibility, auction, auction official*